

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Tinjauan Pustaka

2.1 Kebijakan Luar Negeri

Setelah perjanjian Westphalia dan berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, sistem internasional telah menyaksikan pertumbuhan yang meningkat dalam perkembangan negara-negara bangsa. Perkembangan tersebut yang mengakibatkan terbentuknya 'kebijakan luar negeri' yang bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi keputusan, strategi, dan tujuan interaksi suatu negara dengan negara lain. Menurut Feliks Gross, untuk mengatakan sebuah keputusan untuk tidak memiliki hubungan dengan negara tertentu juga merupakan kebijakan luar negeri. Sebuah negara tanpa politik luar negeri, telah diibaratkan sebuah kapal di laut dalam tanpa mengetahui arah. Oleh karena itu, politik luar negeri memimpin suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dan memperoleh tempat yang layak di antara bangsa-bangsa.

George Modelski, mendefinisikannya sebagai “sistem kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan kegiatan mereka sendiri dengan lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri harus menyoroti cara-cara negara berusaha untuk berubah, dan berhasil mengubah perilaku negara-negara lain.” (Bojang, 2018) Modelski, mencatat hanya

aspek-aspek kebijakan yang mengarah pada perubahan perilaku negara yang ada, sebagai tujuan utama dari kebijakan luar negeri. Namun, kebijakan luar negeri tidak hanya untuk mengubah, tetapi juga kelanjutan perilaku pada waktu yang berbeda. Hal tersebut menyangkut baik perubahan maupun status quo sejauh mereka melayani kepentingan nasional.

Dalam hal ini, negara-negara Uni Eropa melakukan kebijakan luar negeri dengan membatasi adanya imigran dari negara-negara yang terdampak Arab Spring seperti Tunisia. Kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa tersebut sebagai langkah Uni Eropa mengatasi adanya konflik yang nantinya akan terjadi di Uni Eropa jika sebagian besar negara yang terdampak pada fenomena Arab Spring bermigrasi ke negara-negara yang ada di Uni Eropa. Uni Eropa meratifikasi kebijakannya mengenai imigran sebagai kebijakan Luar Negeri negara-negara Uni Eropa.

Merujuk kepada kebijakan luar negeri, dari segi hubungan internasional dinyatakan terdapat sejarah baru dari politik internasional, semua aspek internasional dari kehidupan manusia, dalam artian tingkah laku manusia yang terjadi atau yang bermula di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain, suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri (Darmayadi, dkk, 2015:8) tingkah laku tersebut pula yang menjadi salah satu faktor terbentuknya kebijakan luar negeri.

2.2 Konflik Internasional

Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai perjuangan dengan tuntutan dan nilai-nilai untuk mencapai status, kekuasaan, dan sumber daya tertentu dimana

tuntutan tersebut ditujukan untuk menetralkan, melukai, atau menghancurkan pihak lawan.

Konflik dapat muncul dari sebab-sebab tertentu, yaitu : pendapat yang bertentangan terhadap suatu isu, sikap yang bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik atau militer tertentu, seperti : perluasan wilayah, keamanan, kontrol terhadap sumber-sumber yang berharga, akses terhadap pasar, prestise, penyatuan dengan kelompok etnis yang bertetangga, revolusi dunia, dan penggulingan terhadap pemerintahan yang tidak bersahabat. Dalam usahanya untuk mencapai atau mempertahankan tujuan-tujuan tersebut, kebutuhan dan tindakan suatu pihak dapat berbenturan dengan kepentingan, cita-cita, dan tujuan pihak lain.

Holsti kemudian membagi sumber konflik terdiri atas :

1. Konflik teritorial terbatas, yang disebabkan perbedaan pendapat mengenai kepemilikan sebagian wilayah atau hak untuk mengelola wilayah yang terletak di dalam atau di dekat wilayah negara lain.
2. Konflik yang disebabkan komposisi suatu pemerintah.
3. Konflik yang disebabkan suatu negara berusaha mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya.
4. Konflik karena kehormatan nasional, dimana suatu pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan tindakan yang dianggap salah satu Imperialisme tidak terbatas,

disebabkan suatu pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya untuk tujuan ideologi, keamanan, dan perdagangan.

5. Konflik pembebasan atau perang revolusioner, yang dilakukan suatu negara untuk 'membebaskan' rakyat negara lain yang biasanya disebabkan alasan etnis atau ideologis.
6. Konflik yang timbul karena suatu pemerintah bertujuan untuk mempersatukan negara yang terpisah.
7. Pada beberapa sumber konflik yang telah disebutkan oleh Holsti tersebut dapat menjelaskan konflik yang terjadi setelah fenomena Arab Spring dimana adanya konflik yang terjadi di Negara Tunisia dan beberapa negara lainnya mengakibatkan terjadinya migrasi massa ke negara-negara di Uni Eropa.
8. Selain itu, konflik yang diakibatkan oleh Arab Spring tersebut juga mengakibatkan negara Uni Eropa membuat kebijakan nasional untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya.

2.3 Keamanan Global

Globalisasi mencirikan era di mana kita hidup saat ini dan sering disebut-sebut sebagai titik balik dalam hal keamanan internasional. Kecenderungan dan perubahan-perubahan yang dibawa oleh globalisasi dikatakan menjadi awal bagi perubahan mendasar dalam tatanan dunia. Perubahan tersebut mengarah pada

menghilangnya kecenderungan perang teritorial di antara negara dan menjanjikan politik dunia yang lebih damai.

Namun, di sisi lain, globalisasi membawa ketidakamanan yang lebih besar pula. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, misalnya, telah memberi akses lebih leluasa bagi para kelompok kriminal terorganisasi untuk memperluas jejaring dan wilayah aktivitas mereka, serta menimbulkan ancaman-ancaman baru, seperti kejahatan duniamaya, terorisme dunia maya, serta berbagai mode perang yang sebelumnya tidak terpikirkan, yang sering disebut sebagai fourth generation war. Selain itu, globalisasi yang ditandai dengan fragmentasi dan integrasi serta yang diwarnai oleh semakin meningkatnya kesenjangan antara the haves and the haves-not membuat dunia semakin terasa tidak aman. Globalisasi juga mempertajam perbedaan yang ada sehingga mendorong terjadinya konflik di dalam negara, di samping menumbuhkan peluang untuk berintegrasi di tataran global.

Keamanan internasional mengalami perubahan mendasar sejak peristiwa 9/11. Konsepsi keamanan yang semula menjauh dari negara mulai bergeser kembali kepada negara sebagai aktor utama yang menyediakan keamanan bagi warganya dari ancaman teroris yang merupakan aktor-aktor non-negara. Banyak negara melakukan sekuritisasi dengan mendeklarasikan terorisme sebagai ancaman keamanan nasional yang lantas menjustifikasi pengerahan militer, misalnya Amerika Serikat, Sri Lanka, Filipina, dan China. Di sisi lain, keamanan individu menjadi lebih disorot lebih dari kapanpun karena yang menjadi target (utama) serangan teroris adalah warga sipil.

Adanya pemberontakan yang dilakukan pada fenomena Arab Spring membuat negara-negara Uni Eropa aware mengenai keamanan negara anggotanya dari ancaman global yang bisa diakibatkan oleh para imigran yang bermigrasi ke Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi internasional menjaga keamanan global melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi adanya imigran yang masuk ke Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan keamanan wilayah negara Uni Eropa.

2.4 Organisasi Internasional

Meskipun terdapat aktor negara, organisasi internasional juga dapat memainkan peran kunci dalam hubungan internasional dan dunia politik. Hal ini karena organisasi internasional dapat menghimpun kekuatan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan masalah global. Organisasi internasional menurut T.May Rudy akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”.

Definisi tersebut memberi gambaran bahwa organisasi internasional tidak hanya mengenai hubungan antar pemerintah saja namun juga non-pemerintah, karena pada dasarnya organisasi internasional adalah sebuah struktur yang di buat

atas dasar perjanjian anggotanya, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dari dua atau lebih negara berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama para anggotanya.

Dengan tujuan dari organisasi ditunjukkan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya dan tidak hanya memihak untuk mengejar kepentingan salah satu anggota. Sedangkan struktur dalam susunan organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang memiliki sifat berkepenjangan akan dasar di bentuk dari oleh perjanjian. Sifat struktur formal dapat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya tetapi harus terpisah dari kontrol lanjutan dari satu anggota. Struktur otonom inilah yang membedakan sejumlah organisasi internasional dari serangkaian konferensi atau kongres.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara sesuai dengan kebutuhan atau menurut cara peninjauan organisasi tersebut, yaitu:

- a. Klasifikasi yang didasarkan antara organisasi internasional yang permanen. Perbedaan antara organisasi internasional permanen dan tidak permanen akan terlihat apabila dilihat dari jangka waktu didirikannya organisasi internasional tersebut. Organisasi permanen adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, contohnya PBB. Sebaliknya, organisasi internasional tidak permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun, dan apabila tujuan organisasi tersebut tercapai, maka dapat dibubarkan.
- b. Klasifikasi yang didasarkan pada organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat atau *Non Governmental Organization* (NGO). Organisasi

internasional publik dipakai untuk menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut didirikan atau anggotanya adalah pemerintah. Untuk dapat dikatakan sebagai organisasi internasional publik, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Organisasi internasional tersebut haruslah didirikan berdasarkan pada perjanjian internasional.
 - b) Organisasi internasional harus mempunyai alat perlengkapan (organ).
 - c) Hukum yang berlaku untuk organisasi internasional itu adalah hukum internasional.
- c. Klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaannya. Klasifikasi ini didasarkan pada sistem keanggotaannya. Untuk itu dibedakan antara organisasi yang bersifat universal dan organisasi yang bersifat terbatas. Organisasi yang universal atau disebut juga organisasi internasional global, yaitu organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem perekonomiannya. Menurut H.G. Schermers, organisasi universal mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) Universal.

Sifat universal memang sukar dicapai. PBB bersifat universal namun ada negara yang tidak menjadi anggota PBB, seperti Swiss. Organisasi universal adalah organisasi yang operasinya meliputi seluruh dunia. Peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang universal adalah benar-benar suatu peraturan dari hukum dunia.

- b) Adanya kepentingan pokok.

Dikarenakan oleh semakin majunya teknologi dalam transportasi, komunikasi dan informasi, maka masyarakat internasional semakin butuh adanya kerjasama dalam masalah-masalah internasional seperti perhubungan udara, perhubungan laut, meteorologi, penempatan kabel bawah laut, dan lain-lain. Masalah tersebut memerlukan pengaturan dan standarisasi internasional untuk menciptakan aturan internasional, untuk itu organisasi internasional universal sangat berperan penting bagi dunia internasional.

c) Heterogenitas.

Adanya perbedaan agama, ras, dan kebudayaan mendorong organisasi internasional universal untuk bertindak secara adil dan tidak memihak sebelah. Berbeda dengan organisasi universal yang anggotanya terbuka untuk semua negara tanpa memperhatikan latar belakang politik, ekonomi, budaya, maka untuk organisasi internasional yang terbatas ini keanggotaannya didasarkan pada kriteria sebelum tahun 2002 tertentu. Organisasi internasional yang terbatas ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

- Organisasi regional

Di dalam organisasi regional ini pada kenyataannya tidak semata-mata didasarkan pada letak geografis dari anggotanya, tetapi regional disini lebih ditekankan kepada kepentingan politik dari pada letak geografis. Sebagaimana dengan organisasi universal, maka organisasi regional dapat digolongkan menurut sifat cara kerjanya atau keanggotaannya. Penggolongan tersebut yaitu

Organisasi yang bertujuan kerjasama dalam semua bidang,
Organisasi pertahanan dan Organisasi Fungsional.

- Organisasi dengan latar belakang yang sama
- Organisasi fungsional

d. Klasifikasi yang didasarkan pada sifat organisasi yang supranasional.

Organisasi yang sifatnya supranasional ini berbeda dengan organisasi internasional yang sifatnya koordinatif.

e. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya. Ada organisasi internasional yang dibentuk untuk menjalankan fungsi khusus. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsi khusus dapat dibedakan menjadi:

- a) Fungsi pengadilan,
- b) Fungsi administratif,
- c) Fungsi legislatif semu,
- d) Fungsi serba guna (Jones, 1933)

Sementara menurut Teuku May Rudy, secara terinci tentang penggolongan organisasi internasional menurut kegiatan administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi internasional antar pemerintahan (Inter Governmental Organization) yang sering lazim disingkat menjadi IGO. Anggota-anggotanya adalah pemerintah, atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.

2. Organisasi Internasional Non Pemerintah (Non Governmental Organization) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO, atau INGO (International Non Governmental Organization). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata (Rudy, 2005:5).

Non-Government Organization (NGO) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Organisasi Non Pemerintah atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). NGO adalah suatu kelompok atau asosiasi nirlaba yang beraktifitas di luar struktur politik yang terinstitusionalisasi. Pencapaian hal-hal yang menjadi minat atau tujuan anggotanya diupayakan melalui lobi, persuasi, atau aksi langsung. NGO biasanya memperoleh sebagian pendanaannya dari sumber-sumber swasta. Semakin baik kinerja dan produktifitas yang dihasilkan oleh sebuah NGO sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat semakin besar, maka dana yang akan mengalir ke NGO tersebut tentunya akan semakin besar pula. Hal itu menunjukkan bahwa kepercayaan dari pihak-pihak donatur untuk mendanai sebuah NGO tentu saja semakin besar (Ririen, 2009).

World Bank membagi NGO ke dalam 2 kelompok, yaitu:

1. NGO Operasional

Tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan

program mereka. Proses ini umumnya membutuhkan organisasi yang kompleks. NGO operasional ini masih dapat dibagi atas 3 kelompok besar:

- 1) Organisasi berbasis masyarakat, yang melayani suatu populasi khusus dalam suatu daerah geografis yang sempit,
- 2) Organisasi Nasional, yang beroperasi dalam sebuah negara yang sedang berkembang, dan,
- 3) Organisasi Internasional, yang pada dasarnya berkantor pusat di negara maju dan menjalankan operasi di lebih dari satu negara yang sedang berkembang.

2. NGO Advokasi

Tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis. NGO ini pada dasarnya bekerja melalui advokasi atau kampanye atas suatu isu dan tidak mengimplementasikan program. Kelompok ini menjalankan fungsi yang hampir sama dengan kelompok operasional, namun dengan tingkatan dan komposisi yang berbeda. Pencarian dana masih perlu namun dengan ukuran yang lebih kecil (Candra, 2009).

Menurut Abidin & Rukmini dalam Zulfan (2008), karakteristik NGO sendiri pada umumnya adalah:

1. Independen, artinya tidak berafiliasi kepada sebuah kekuatan politik tertentu.
2. Nirlaba, artinya non-profit atau tidak mencari keuntungan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
3. Sukarela, lebih menyediakan waktu untuk kepentingan lembaga.
4. Non-birokratis, tidak melalui prosedur yang berbelit-belit.
5. Komunitas kecil, terdiri dari beberapa orang saja, dilihat dari struktur dan ruang lingkup.
6. Lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah (*grassroots*).

Beralih kepada Intergovernmental Organization (IGO), suatu organisasi antar negara yang terlahir ketika adanya dua atau lebih negara yang menandai perjanjian atau piagam yang menjadi sebuah konstitusi organisasi yang menjadi pedoman untuk mencapai sasaran bersama. Klasifikasi organisasi antar pemerintah dilihat berdasarkan lingkup geografi dan keanggotaan serta tujuan yang hendak dicapainya.

Intergovernmental Organization (IGO) adalah institusi yang setiap anggotanya adalah merupakan delegasi resmi pemerintah negara-negara serta biasanya bermarkas di kota-kota besar. IGO memiliki anggota atau staff professional yang bekerja full time yang dianggap sebagai pegawai sipil internasional dan di harapkan mengembangkan kesetiaan yang bersifat suprasional atau organisasi. Tujuan jangka panjang IGO sendiri biasanya ditentukan oleh badan-badan yang disebut majelis umum yang terdiri anggota negara yang

terwakili. Mereka mengadakan rapat paripurna atau pleno sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk menentukan batas-batas dari kebijaksanaan umum serta tindakan yang harus diambil (Sitepu, 2011).

IGO dipimpin oleh dewan eksekutif yang terdiri dari sejumlah kecil delegasi pemerintah yang bersifat permanen maupun berganti. Dewan ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam lembaga eksekutif, sekretariat dan melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. IGO bisa di klasifikasikan dalam 4 kategori berdasarkan keanggotaan serta tujuannya, diantaranya:

1) *Global Membership and General Purposes Organizations.*

Merupakan organisasi seperti PBB, LBB yang mempunyai cakupan yang luas dan berbagai fungsi seperti pertahanan dan keamanan, kerja sama sosial dan ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya.

2) *Global Membership and Limited Purposes Organizations.*

Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki fungsi seperti badan-badan khusus PBB, International Bank of Reconstruction Development (IBRD), World Health Organization (WHO), dan UNESCO.

3) *Regional Membership and General Purposes Organizations.*

Merupakan organisasi-organisasi yang bersifat regional yang mempunyai luas lingkup sasarannya atau kegiatan diantaranya dalam bidang-bidang seperti keamanan, politik, ekonomi sosial.

4) *Regional Membership and Limited Purpose Organization*

Merupakan organisasi-organisasi yang memiliki sub-devisi dalam bidang ekonomi-sosial dan militer atau organisasi-organisasi pertahanan misalnya NATO dan LAFTA (Sitepu, 2011).

Ruang lingkup dari organisasi pemerintah terbagi dalam regional maupun global serta mencakup masalah-masalah sosial, ekonomi serta perang dan damai. Pertumbuhannya sendiri tidak terbatas terhususnya pada tingkat regional. Fungsi Intergovernmental Organization Fungsi dari IGO adalah untuk mengatasi masalah global secara efektif tanpa adanya perang serta memfasilitasi kepentingan dari negara-negara anggotanya dalam melakukan komunikasi serta kerja sama dengan sesama anggota negara lain dalam mencapai tujuan bersama (Archer, 2001).

Terdapat teori organisasi internasional yang menyebutkan 3 fungsi dari IGO yaitu:

1. Negara menggunakan IGO sebagai instrument untuk berdiplomasi dengan negara yang lain karena pada dasarnya negara-negara membentuk IGO berkaitan dengan kepentingan negara mereka yang bersangkutan dengan kepentingan negara lain.
2. Sebagai tempat forum untuk berkomunikasi untuk bekerjasama, persetujuan bahkan pertentangan dimana arena tersebut bersifat netral. Arena ini menjadi tempat untuk mengedepankan kepentingan, menunjukkan sudut pandang terhadap sesuatu didepan forum.

3. IGO berperan sebagai aktor yang tidak terpengaruh dari luar ketika membuat sebuah kebijakan. Dengan memiliki kapasitas sebagai aktor yang di tentukan oleh rekomendasi, resolusi dan mandat pada saat di bentuknya organisasi tersebut (Archer, 2001).

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan konsep peran organisasi internasional digunakan oleh peneliti untuk menjadi konsep pendukung pada penelitian ini. Dimana Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk dengan kesepakatan bersama. Uni Eropa juga memiliki struktur, tujuan dan fungsi yang jelas demi tercapainya dan terciptanya Konstitusi.

2.5 Migrasi Internasional

Terdapat beberapa definisi mengenai migrasi internasional yang dapat digunakan, salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Zlotnik (1992) bahwa migrasi internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya.

Pengertian yang lebih luas tentang definisi migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan penduduk yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan-keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan. Di samping itu, kebanyakan negara memiliki sejumlah kategori dalam kebijakan dan statistik migrasi negaranya masing-masing, dan migrasi internasional merupakan bagian integral dari globalisasi yang ditandai dengan

semakin melebarnya, mendalamnya dan semakin cepatnya keterkaitan antara seluruh aspek kehidupan sosial kontemporer dunia (Lee, 1996).

Migrasi internasional difasilitasi oleh peningkatan berbagai arus lintas batas negara, termasuk informasi modern dan teknologi komunikasi. Di satu sisi, banyak negara membuka diri terhadap arus modal dan komoditas sebagai bagian dari globalisasi. Di sisi lain, tidak sedikit negara yang memandang migrasi, berkaitan dengan perbedaan budaya, sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional. Migrasi internasional terjadi dalam sebuah dunia yang terbagi atas sejumlah negara, dimana bertempat tinggal di negara tempat kelahiran masih menjadi sebuah norma dan berpindah ke negara lain adalah sebuah penyimpangan (Castles, 2000).

Maka dari itu, migrasi sering kali dianggap sebagai suatu permasalahan, suatu hal yang harus dikontrol dan bahkan harus dibatasi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sejumlah permasalahan terjadi bukan hanya karena adanya perbedaan jenis migrasi secara statistik, tetapi lebih karena adanya perbedaan yang berkaitan dengan berbagai konteks sosial yang terjadi sebagai akibat migrasi.

Definisi dan jenis-jenis Migrasi Internasional dalam cakupan yang lebih luas, perpindahan penduduk melewati batas-batas suatu negara. Istilahnya adalah migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Jenisnya ada tiga macam, yaitu imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Penjelasan secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. Imigrasi adalah masuknya orang luar negeri ke dalam negeri. Pelakunya dikenal dengan sebutan imigran.
2. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dalam negeri ke luar batas negaranya dengan tujuan menetap. Pelakunya dikenal dengan sebutan emigran.
3. Repatriasi adalah kembalinya imigran ke negara asalnya (Amalia dan Antika, 2017).

Migrasi nasional dan internasional dapat disebabkan banyak hal, misalnya karena berkurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal yang menyebabkan seseorang pindah mencari kerja ke tempat lain. Ada juga perpindahan karena diskriminasi sosial, politik, agama, dan sebagainya. Akibatnya, seseorang pindah untuk mencari tempat yang lebih aman dan kondusif.

Terdapat sejumlah dampak positif dan negatif migrasi nasional maupun internasional. Untuk dampak-dampak positif diantaranya sebagai berikut:

Migrasi nasional dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sebabnya, lokasi tujuan transmigran biasanya memiliki sumber daya alam atau lapangan pekerjaan yang lebih terjangkau.

- a) Migrasi nasional dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. Biasanya, tempat transmigrasi akan menjadi lebih produktif secara ekonomi.
- b) Dampak positif migrasi nasional dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya.

- c) Migrasi nasional juga dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk di suatu negara.
- d) Dampak positif migrasi internasional membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli dalam suatu negara.
- e) Migrasi internasional membawa penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan.
- f) Migrasi internasional, terutama dari negara maju akan membawa ilmu dan teknologi modern pada negara berkembang sehingga dapat mempercepat alih teknologi.
- g) Migrasi internasional juga dapat menambah rasa solidaritas antarbangsa dan mengurangi stereotip antarwarganya.

Sementara untuk dampak-dampak negatif adalah sebagai berikut:

- a) Jika orang yang melakukan migrasi lebih sukses daripada penduduk lokal, kadang kala muncul kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran.
- b) Orang yang tidak betah di lokasi migrasiya dan kembali ke daerah asal akan membuat tanah pertanian atau usahanya menjadi terbengkalai di lokasi migrasi tersebut.
- c) Migrasi internasional membuat budaya asing masuk ke negara tujuan, yang kadang kala tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- d) Tidak semua imigran bertujuan baik, ada juga pelaku kriminal, seperti pengedar narkoba, orang yang berideologi politik tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa (Amalia dan Antika, 2017).

Konsep migrasi yang merupakan salah satu bidang kajian penting ilmu-ilmu sosial memiliki banyak aspek memiliki definisi. Dalam pengertian yang paling umum, imigrasi; "untuk alasan ekonomi, sosial, politik individu atau komunitas dari satu negara ke negara lain, dari satu pemukiman ke pemukiman lain. Dapat didefinisikan sebagai "pergi ke pemukiman, emigrasi, imigrasi". Dengan sedikit membuka konsep migrasi, "orang-orang mendapatkan dari tanah tempat mereka tinggal, peluang ekonomi, struktur sosial yang mapan, budaya dan kehidupan sosial menetap di lingkungan baru dengan memutuskan atau terputus dari lebih banyak elemen, "membangun kehidupan baru" (Toros, 2008) Migrasi adalah sebuah konsep geografis. dapat didefinisikan sebagai kota atau kota yang berbeda dari tempat individu menjalani kehidupan mereka. menggambarkan pemukiman kembali di daerah pedesaan (Bartram, Poros, & Monforte, 2017). Konsep migrasi tersebut dipandang sebagai satu kesatuan dengan aspek sosial, politik, budaya, ekonomi dan demografi harus diambil.

Peristiwa migrasi, dari keberadaan umat manusia hingga saat ini, dalam setiap periode, politik, ekonomi dan Ini adalah fenomena yang terjadi karena alasan sosial dan tidak kehilangan mata uangnya. di seluruh dunia Tidak ada negara yang tidak terpengaruh oleh imigrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan migrasi massal dapat dipahamidari data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa ke data PBB Pada 2020, jumlah migran internasional adalah 79 juta dari 2010 hingga 2020 telah meningkat menjadi lebih dari 302 juta. Rasio imigran internasional terhadap populasi dunia. Sementara itu 2,8% pada tahun 2000, angka ini meningkat menjadi 4,2% pada tahun 2020 (PBB, 2020). Migrasi massal atau meningkatnya pergerakan

imigrasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa isu migrasi tetap penting dan aktual didemonstrasikan sekali lagi.

Karena konsep migrasi mempengaruhi banyak cabang ilmu pengetahuan, adalah mungkin untuk menemukan definisi yang berbeda, bisa jadi dari perspektif ilmu-ilmu sosial, migrasi; individu dan/atau kelompok melampaui batas simbolik, geografis atau politik, ke habitat baru dan/komunitas baru. Ini adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan gerakan yang diarahkan (Marshall, 1999). Baru Konsep ini, yang berarti pemindahan fisik untuk ruang hidup, adalah politik, sosial danadministras Ini adalah tindakan multidimensi ekonomi. Dalam pengertian yang paling umum, tempat Anda tinggal adalah administrasi Migrasi, yang mengacu pada perpindahan baik negara asal maupun negara tujuan.

Karena konsep migrasi mempengaruhi banyak cabang ilmu pengetahuan, adalah mungkin untuk menemukan definisi yang berbeda, bisa jadi dari perspektifilmu-ilmu sosial, migrasi; individu dan/atau kelompok melampaui batas simbolik.

Geografis atau politik, ke habitat baru dan/komunitas baru. Ini adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan gerakan yang diarahkan (Marshall, 1999). Konsep ini, yang berarti pemindahan fisik untuk ruang hidup, adalah politik, sosial danadministras Ini adalah tindakan multidimensi ekonomi. Dalam pengertian yang palingumum, tempat Anda tinggal adalah administrasi Migrasi, yang mengacu pada perpindahan baik negara asal maupun negara tujuan, Ini adalah tindakan sosial yang mempengaruhi orang-orang (Castles dan Miller, 2008: 32).

Konsep imigrasi pada orang terjadi dalam bentuk fisik meninggalkan lingkungan mereka dan pindah ke tempat lain. sesuai dengan perubahan spasial. Namun, dengan sifatnya yang beragam, kompleks dan heterogen, hanya untuk pergi dari tempat saat ini ke tempat lain, yaitu untuk mengubah tempat fisik. tetapi juga daristruktur dan lingkungan sosial ekonomi dan budaya ke lingkungan lain. Itu juga berartilewat. individu untuk generasi tertentu. sebagai proses meninggalkan tanah air dan berintegrasi kembali dengan masyarakat/budaya baru. (Markley, 2011: 372) migrasi bukan hanya perubahan fisik tempat, itu adalah multidimensi adalah konsepnya. Olehkarena itu, konsep migrasi tidak hanya perubahan fisik tempat, tetapi juga individu. dan perlu mempertimbangkan dan mengevaluasi semua aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sosial, budaya, ekonomi, politik, dll dari masyarakat. erat dengan seluruh tubuhnya Migrasi, yang berkaitan dengan migrasi, adalah subjek yang menarik perhatian semua orang karena sifatnya yang beragam. Migrasi secara langsung berkontribusi pada perkembangan (peningkatan) populasi negara atau komunitas kkecil struktur umur dan jenis kelamin penduduk sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi juga mengarah pada perubahan. Perubahan ini juga mempengaruhi struktur budaya, ekonomi dan politik masyarakat.

Dewasa ini, pergerakan migrasi individu, kelompok atau komunitas Ini memiliki arti lebih dari sekedar perpindahan pada tingkat. Migrasi; individu, Dimulai dengan perubahan persepsi kelompok dan masyarakat dan berlanjut dengan perpindahan ruang. Itu dianggap sebagai serangkaian proses yang diselesaikan selarasdengan tujuan dan tercapai. Globalisasi, penggunaan media

sosial dll. negara dengan alasan meningkatnya mobilitas manusia antar manusia, fenomena migrasi politik, ekonomi, sosial dan budaya telah menjadikannya fenomena yang sangat penting yang tidak kehilangan ketepatan waktu dengan dimensinya.

2.5.1 Perkembangan Isu Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan fenomena yang dinamis dan multidimensi. Fenomena migrasi dipengaruhi dan ditransformasikan oleh kondisi yang ada di dalamnya (Şener, 2017: 4). Konsep “desa global” yang digunakan Marshall McLuhan untuk menggambarkan dunia pasca-Perang Dingin menunjukkan bahwa kualitas dan makna yang dikaitkan dengan migrasi juga telah berubah (Ariboğan, 2019: 29). Di desa global yang sedang berkembang ini, perpindahan sekecil apa pun memengaruhi semua komunitas dengan efek domino.

Teori chaos N. Lorenz juga berguna dalam menjelaskan makna baru migrasi. “Migrasi telah mengambil bentuk yang sama sekali baru di mana bahkan perpindahan sederhana telah mengguncang banyak keseimbangan di dunia.” (Sağır, 2019: 116) Migrasi, yang tidak dapat diabaikan pada periode waktu sekarang dan mungkin pada abad-abad berikutnya, beroperasi dengan tiga aktor utama; negara pengirim (source country), negara penerima (destination country), dan pendatang berpindah. Dari perspektif ketiga aktor tersebut, migrasi memiliki makna yang berbeda pada tataran politik dan ekonomi atas dasar kepentingan dan harapan yang berbeda (İçduygu et al., 2014: 34).

Fakta bahwa manusia bergerak dengan keberadaannya telah menempatkan konsep migrasi ke dalam kehidupan. Di bidang akademik, studi migrasi yang dimulai dengan EG Ravenstein pada abad ke-19 (Çağlayan, 2016: 68) diikuti oleh banyak studi teoritis pada abad ke-20 dan ke-21. Migrasi yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial, ekonomi dan politik memiliki sifat yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, teori-teori migrasi yang dikemukakan dalam bidang akademik juga dibentuk dalam kerangka perubahan ini, dan teori-teori tersebut terus berkembang satu sama lain tergantung pada perubahan tersebut (Özcan, 2017: 209-210).

Meskipun teori-teori yang menyajikan perspektif yang berbeda tentang penyebab, konsekuensi dan solusi migrasi telah dikemukakan, seperti yang dinyatakan Nermin Abadan-Unat, “tidak ada satu teori besar yang menjelaskan migrasi dalam ilmu-ilmu sosial” (Südaş dan Mutluer, 2010: 32). Selain itu, untuk mengklasifikasikan konsep “migrasi” dalam studi migrasi, waktu (sementara/permanen), ukuran arus (individu/kelompok/massa), alasan (sukarela/tidak sukarela atau wajib), wilayah (nasional/internasional) dan kriteria status hukum (legal/ilegal) ditetapkan sebagai (Sagin, 2019:16). Sementara internasionalisasi gerakan migrasi menyebabkan perubahan karakteristik migrasi, perubahan arus migrasi internasional atas dasar "ilegalisasi" juga mengamankan fenomena migrasi (Sagin, 2019: 95).

Jika berdasarkan dari permasalahan dan tinjauan teori yang sudah dijelaskan pada penelitian ini maka ditemukan variable – variable utama yang menunjang pada penelitian ini yaitu, (1) Arab Spring, (2) Gerakan migrasi timur tengah ke Negara –

negara Uni Eropa, (3) Dampak Migrasi, (4) Kebijakan Uni Eropa. Untuk memperjelas mengenai variable - variable tersebut maka peneliti akan menjelaskan secara runut bagaimana konsep yang membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini beserta peta konsep untuk menjelaskan keterhubungan dari variable – variable yang ada.

1. Peristiwa Arab Spring yang menjadi runtutan pertama yang menjadi gagasan dalam penelitian ini. Peristiwa yang terjadi di Tunisia pada tahun 2011 ini menyebabkan efek yang menyebar ke negara-negara lain, yaitu Libya, Mesir, Yaman, Suriah, Bahrain, Maroko, Irak, Aljazair, Lebanon, Yordania, Kuwait, Oman, dan Sudan. Aksi protes besar-besaran yang terjadi di banyak negara ini menimbulkan dampak yang sangat besar salah satunya yaitu gerakan migrasi massa.
2. Gerakan migrasi timur tengah ke Negara – negara Uni Eropa yang disebabkan karena adanya dampak dari fenomena Arab Spring. Konflik yang terjadi di timur tengah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat disana yang kehilangan jaminan keamanan dan juga krisis ekonomi yang membuat mereka terpaksa untuk berpindah tempat ke negara – negara Uni Eropa untuk mendapatkan perlindungan serta kelangsungan hidup yang lebih baik.
3. Adanya gerakan migrasi massa pasca Arab Spring ke Negara – negara Uni Eropa pastinya menimbulkan dampak dan permasalahan,

seperti adanya lonjakan angka penduduk di negara tujuan migrasi serta adanya kasus imigran ilegal yang marak terjadi dan berbagai dampak permasalahan lainnya.

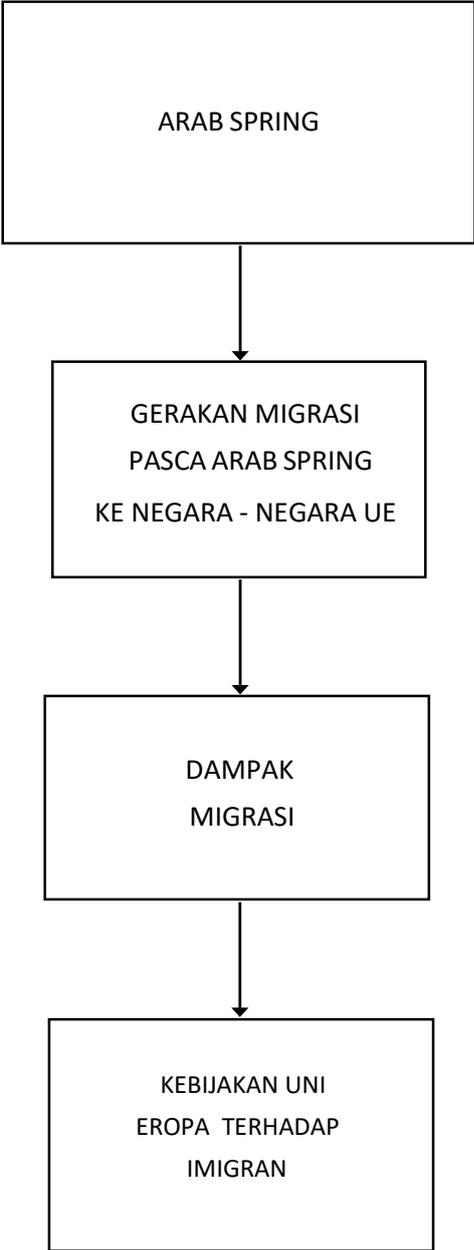
4. Dampak dan permasalahan yang ditimbulkan dari adanya gerakan migrasi massa pasca Arab Spring ke Negara – negara Uni Eropa tentunya menimbulkan reaksi yang mengakibatkan perubahan suatu kebijakan dari Uni Eropa selaku Organisasi regional dikawasan, untuk menyikapi dampak dan permasalahan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Dalam definisi tersebut, kerangka berpikir dibuat lebih identik untuk karya tulis ilmiah. Biasanya sudah mulai disusun sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, yang memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir kemudian bisa dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir (Abdhuil, 2022).

Pada penelitian ini, kerangka berpikir dijelaskan dan digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung bermula dari fenomena Arab Spring. Banyak faktor yang menjadi pemicu sehingga aksi dari fenomena Arab Spring tersebut terus berlangsung di seluruh negeri di Timur Tengah. Pemberontakan tersebut memberikan dampak diantaranya kekerasan meningkat dan ketertiban umum runtuh. Di tengah kekacauan ini, gelombang migrasi campuran ke Eropa

meningkat melalui Libya, Mediterania, sehingga muncul gerakan migrasi massa pasca Arab Spring. Para imigran yang kemudian bermigrasi ke Uni Eropa, mempengaruhi kebijakan-kebijakan imigran yang telah ada di Eropa, oleh karena itu di dalam penelitian ini dibahas pula bagaimana dampak migrasi massa pasca Arab Spring dan perubahan kebijakan Uni Eropa terhadap imigran. Berikut peta konsep dari kerangka pemikiran penelitian ini:



(Sumber: Peneliti, 2022)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran